

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK SELAMA PERIODE (2012-2016)

Arifah¹⁾, Rita Andini²⁾, Kharis Raharjo³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang

^{2), 3)} Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang
Tahun 2017

ABSTRACT

Taxes are used as one of the efforts used by the government to realize the independence of a nation or the State in development financing for the common good.

This research examined the Influence of Tax Administration System Modernization, Service Quality, Knowledge Taxation, Taxation and Sanctions Compliance Awareness Taxation of the KPP Pratama Demak Period (2012-2016). Respondents in this research were all registered taxpayers diKPP Pratama Demak. Samples used as much as 137 taxpayers and method for selecting the sample in this research using purposive sampling, to determine the relationship between variables the authors use the method of calculation analysis of the validity and reliability, and multiple linear regression analysis with analysis tools SPSS version 16.

Based on the results of multiple linear regression analysis (SPSS output Version 16) indicates that the quality of service and tax penalties have a significant effect on tax compliance while modernizing the system of tax administration, tax knowledge, and awareness of taxation does not significantly influence taxpayer compliance.

Keywords : Tax Administration System Modernization, Service Quality, Knowledge Taxation, Taxation and Sanctions, Awareness Taxation.

ABSTRAKSI

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan bagi kepentingan bersama.

Penelitian ini menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Responden dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar diKPP Pratama Demak. Sampel yang digunakan sebanyak 137 wajib pajak dan metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sedangkan untuk mengetahui hubungan antar variabel penulis menggunakan metode perhitungan analisis validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS Versi 16.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (output SPSS Versi 16) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikutipula dengan kebijakan – kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan bagi kepentingan bersama.

Candra, Wibisono, dan Mujilan (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini menjadi penting karena dengan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tujuan utama dari reformasi perpajakan yaitu penegakan dalam hal kemandirian ekonomi untuk membiayai pembangunan nasional dengan mengerahkan segenap kemampuan sendiri. Secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan pajak dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Adanya reformasi perpajakan membuat sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana yang meliputi penyederhanaan jenis, tarif, pembayaran pajak dan pembenahan pegawai perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan beban pajak akan semakin adil serta wajar, sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak serta menghindarkan diri dari pegawai pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah

meningkatkan penerimaan pajaknya. Namun pada penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi variabel independen berbeda. Peneliti pertama Adhitya Febrian Arifin (2015) menguji tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti kedua I Putu Indra (2016) menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Peneliti ketiga Annisa Dyah Perwira (2016) menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan niat untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan penelitian sekarang menguji tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga dari segi objek juga berbeda. Penelitian yang dilakukan Adhitya Febrian Arifin (2015) adalah KPP Pratama Setiabudi satu. I Putu Indra (2016) melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar. Penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Demak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memberi judul :

“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012 – 2016)”.

Tinjauan Pustaka

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori signaling adalah perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek baik kedepannya akan cenderung mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para pemakai informasi (mamduh Hanafi 2010 : 20 dalam Aditya Nugroho 2016).

Dikaitkan dengan teori sinyal ini, teori ini mempunyai gambaran bahwa dalam kualitas pelayanan harus baik agar wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Demak dibandingkan dengan KPP lain. Selain itu juga dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat terwujudnya kesadaran perpajakan dalam membayar pajak sehingga terciptalah kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal (Robbins, 2002 : 47 dalam Ma'rifatumbillah, 2016) .

Teori atribusi ini berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain sikap dan tindakan

wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing – masing individu.

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), Sistem Administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013).

Kualitas Pelayanan

Menurut Fitzsimmons bersaudara dalam Sulastiyono (2011:35-36) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang kompleks, dan tamu akan menilai kualitas pelayanan melalui lima prinsip dimensi pelayanan sebagai ukurannya, yaitu sebagai berikut :

1. Reliabilitas (*Reliability*), adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu.
2. Responsif (*Responsiveness*), yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat waktu.
3. Kepastian/jaminan (*Assurance*), adalah pengetahuan dan kesopanan santunan serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi assurance memiliki ciri-ciri : kompetensi untuk memberikan

pelayanan, sopan dan memiliki sifat respek terhadap tamu.

4. Empati (*Empathy*), memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Dimensi empathy ini memiliki ciri-ciri : kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan dan usaha untuk mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan tamu.
5. Nyata (*Tangibles*), yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata , yaitu : penampilan para pegawai, dan fasilitas-fasilitas fisik, lainnya seperti peralatan dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pelayanan.

Dalam hal memberikan kualitas pelayanan Kantor Pajak adalah tugas dan kewajiban setiap fiskus. Sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan juga sebagai kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan yang dibutuhkan setiap wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah

telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan dapat berupa denda atau bunga dan paling berat adalah pidana. Sanksi merupakan salah satu variable yang berpengaruh pada motivasi membayar pajak, karena fungsi sanksi sendiri ialah digunakan sebagai mengatur sekelompok populasi untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

Menurut Pandapotan Ritonga (2011:15) dalam Artiningsih (2013: 13), Kesadaran Prpajakan merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuaidengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) yang dikutip oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009: 5) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak

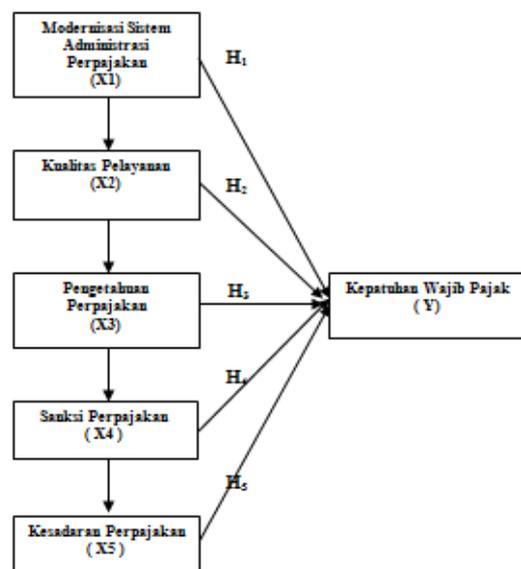
Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan hasil telaah pustaka mengenai variabel – variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 :

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis 2 :

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis 3 :

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis 4 :

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis 5 :

Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang-orang, peristiwa dan hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sekaran, 2000 dalam Diyan Sulistiyani 2016) Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran, 2003 dalam Diyan Sulistiyani, 2016). Mengingat keterbatasan peneliti, maka peneliti mengambil sampel dengan *purposive sampling method*. Purposive

sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut bawa seringkali banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara andom (acak), sehingga kalau menggunakan random sampling akan menyulitkan peneliti. Sedangkan dengan menggunakan *purposive sampling* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar – benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kriteria dalam pemilihan responden adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
2. Wajib pajak yang mempunyai NPWP

Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama demak. Sampel yang diambil dalam penelitian ini , menggunakan rumus slovin, hal ini dikarenakan ukuran popilasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal.

Ukuran sampel dengan rumus :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = Nilai Kritis (batas ketelitian 8%)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{74.555}{(1 + 74555(0,08)^2)}$$

$$n = \frac{74.555}{478,152}$$

$$n = 155,92$$

$$n = 156 \text{ (dibulatkan)}$$

Jadi sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 156 wajib pajak yang berada di KPP pratama demak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Responden

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari data primer dengan menggunakan metode survei yaitu menggunakan kuesioner. Kuisoner yang disebarakan minimal 156 responden, ada 10 kuesioner tidak lengkap dan 9kuesioner tidak terisi, sehingga tidak dapat digunakan, jadi yang dapat digunakan penelitian sebanyak 137 kuesioner.

Tabel 4.2
Deskriptif Karakteristik/ Identitas/ Profil Responden

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
1. Laki - laki	78	56,9 %
2. Perempuan	59	43,1 %
Jumlah	137	100%
Umur Responden		
1. 25-30 tahun	48	35 %
2. 31-35 tahun	38	27,7 %
3. 36-40 tahun	29	21,2 %
4. 41-50 tahun	22	16,1 %
Jumlah	137	100 %
Pekerjaan		
1. Guru	19	14 %
2. Jasa Keperawatan kesehatan	4	3 %
3. Jasa selain Keperawatan	7	5 %
4. Karyawan Swasta	22	16 %
5. Pedagang	8	6 %
6. Pegawai Negeri	18	13 %
7. Pengusaha	5	4 %
8. Pegawai BUMN	3	2 %
9. Petani	7	5 %
10. Polisi	8	6 %
11. Swasta	35	26 %
Jumlah	137	100 %
Pendidikan		
1. SLTA	19	13,8 %
2. Diploma	37	27 %
3. Sarjana	81	59,2 %
4. Pasca Sarjana	-	-
Jumlah	137	100 %
Masa Kerja		
1. 0-10 Tahun	118	86,1 %
2. 11-20 Tahun	19	13,9 %
3. 21-30 Tahun	-	-
4. 31-40 Tahun	-	-
Jumlah	137	100 %
Kepernikaan NPWP		
1. Ya	137	100 %
2. Tidak	-	-
Jumlah	137	100%

Sumber : Data Diolah, 2017

Analisis Deskriptif

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 4 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variable Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Deskriptif frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
X1.1	0	0	2	1,5	14	10,2	33	24,1	88	64,2
X1.2	0	0	3	2,2	16	11,7	31	22,6	87	63,5
X1.3	0	0	1	0,7	23	16,8	51	37,2	62	45,3
X1.4	0	0	2	1,5	23	16,8	33	24,1	79	57,7
Rata²	0	0	2	1,47	19	13,87	37	27	79	57,67

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori

sangat setuju dengan nilai rata-rata 57,67 persen dalam menjawab pertanyaan tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sehingga dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk menganalisa mengenai Kualitas Pelayanan, maka peneliti menggunakan 5 indikator pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel Kualitas Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Deskriptif frekuensi Kualitas pelayanan

No	STS	%	TS	%	KS	%	S	%	SS	%
X2.1	0	0	7	5,1	16	11,7	39	28,5	75	54,7
X2.2	0	0	0	0	17	12,4	55	40,1	65	47,4
X2.3	0	0	1	0,7	9	6,6	31	22,6	96	70,1
X2.4	0	0	1	0,7	16	11,7	51	37,2	69	50,4
X2.5	0	0	0	0	18	13,1	44	32,1	75	54,7
Rata²	0	0	1,8	1,3	15,2	11,1	44	32,1	76	55,46

Berdasarkan tabel diatas diketahui bawa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dengan nilai rata-rata 55,46 persen dalam menjawab pertanyaan tentang kualitas pelayanan. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk menganalisa mengenai seberapa besar tingkat Pengetahuan Perpajakan, maka peneliti menggunakan 5 indikator pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel Pengetahuan Perpajaka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Deskriptif frekuensi Pengetahuan Perpajakan

No	STS	%	TS	%	KS	%	S	%	SS	%
X3.1	0	0	1	0,7	15	10,9	49	35,8	72	52,6
X3.2	0	0	5	3,6	15	10,9	42	30,7	75	54,7
X3.3	0	0	2	1,5	11	8,0	41	29,9	83	60,6
X3.4	0	0	6	4,4	22	16,1	45	32,8	64	46,7
X3.5	0	0	1	0,7	21	15,3	28	20,4	87	63,5
Rata²	0	0	3	2,18	16,8	12,24	41	29,92	76,2	55,62

Berdasarkan tabel diatas diketahui bawa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dengan nilai rata-rata 55,62 persen dalam menjawab pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat

mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan dari penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 5 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel Sanksi Perpajakan dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Deskriptif frekuensi Sanksi Perpajakan

No	STS	%	TS	%	KS	%	S	%	SS	%
X4.1	0	0	4	2.9	13	9.5	38	27.7	82	59.9
X4.2	0	0	8	5.8	19	13.9	49	35.8	61	44.5
X4.3	1	0.7	4	2.9	28	20.4	43	31.4	61	44.5
X4.4	1	0.7	6	4.4	19	13.9	54	39.4	57	41.6
X4.5	0	0	11	8.0	27	19.7	48	35.0	51	37.2
Rata ²	0.4	0.28	6.6	4.8	21.2	15.48	46.4	33.86	62.4	45.54

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dengan nilai rata-rata 45,54 persen dalam menjawab pertanyaan tentang sanksi perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dengan nilai rata-rata 45,54 persen dalam menjawab pertanyaan tentang sanksi perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.7
Deskriptif frekuensi Kesadaran Perpajakan

No	STS	%	TS	%	KS	%	S	%	SS	%
X5.1	0	0	5	3.6	26	19.0	54	39.4	52	38.0
X5.2	0	0	2	1.5	39	28.5	49	35.8	47	34.3
X5.3	0	0	4	2.9	27	19.7	36	26.3	70	51.1
X5.4	0	0	5	3.6	13	9.5	41	29.9	78	56.9
X5.5	0	0	1	0.7	17	12.4	40	29.2	79	57.7
Rata ²	0	0	3.4	2.46	24.4	17.86	44	32.12	65.2	47.6

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dengan nilai rata-rata 47.6 persen dalam menjawab pertanyaan tentang kesadaran perpajakan. Sehingga dengan adanya kesadaran perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak dari penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 4 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Deskriptif frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

N0	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
Y1	0	0	2	1.5	14	10.2	49	35.8	72	52.6
Y2	0	0	0	0	14	10.2	61	44.5	62	45.3
Y3	0	0	3	2.2	10	7.3	58	42.3	66	48.2
Y4	0	0	3	2.2	11	8.0	27	19.7	96	70.1
Rata ²	0	0	2	1.47	12.25	8.92	48.75	35.57	74	54.05

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 137 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dalam menjawab pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak dengan nilai rata-rata 54,05 persen. Sehingga dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka pembiayaan pembangunan Negara berjalan lancar.

Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa Regresi Linear Berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan Analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 16 seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rangkuman Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial		Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.050	1.972		1.039	.301	-1.851	5.950					
Modernisasi	.141	.091	.46	1.546	.125	-.038	322	.408	.134	.110	.569	1.756
Kualitas	.210	.080	.218	2.644	.009	.053	368	.432	.225	.189	.751	1.332
Pengetahuan	.088	.077	.103	1.135	.259	-.065	240	.403	.099	.081	.616	1.624
Sanksi	.217	.067	.261	3.235	.002	.084	350	.436	.272	.231	.783	1.276
Kesadaran	.065	.077	.073	.841	.402	-.087	217	.315	.073	.060	.674	1.484

a. Dependent Variable: kepatuhan WP

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengolahan data maka didapat model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,050 + 0,141X1 + 0,210X2 + 0,088X3 + 0,217X4 + 0,065X5 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib pajak
 X1 = Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
 X2 = Variabel Kualitas Pelayanan
 X3 = Variabel Pengetahuan Perpajakan
 X4 = Variabel Sanksi Perpajakan
 X5 = Variabel Kesadaran Perpajakan
 e = Error

Interpretasi hasil analisa Regresi antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Hubungan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (0,141) yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan arah pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Hubungan variabel Kualitas Pelayanan (X2) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (0,210) yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Kualitas Pelayanan dengan arah pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Kualitas Pelayanan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Hubungan variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (0,088) yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Pengetahuan Perpajakan dengan arah

pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Hubungan variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (0,217) yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Sanksi Perpajakan dengan arah pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Sanksi Perpajakan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Hubungan variabel Kesadaran Perpajakan (X5) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (0,065) yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Kesadaran Perpajakan dengan arah pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Kesadaran Perpajakan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk menguji kemampuan variabel untuk menjadi alat ukur variabel-variabel dalam penelitian, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X), Kualitas Pelayanan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kesadaran Perpajakan (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai *corrected item-total correlation* dengan r tabel. Jika nilai

corrected item-total correlation lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka data dinyatakan valid (Ghozali, 2011:94).

Uji Validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Modernisasi (X₁)			
X1.1	0.523	0.1678	Valid
X1.2	0.499	0.1678	Valid
X1.3	0.400	0.1678	Valid
X1.4	0.429	0.1678	Valid
Kualitas (X₂)			
X2.1	0.386	0.1678	Valid
X2.2	0.362	0.1678	Valid
X2.3	0.411	0.1678	Valid
X2.4	0.419	0.1678	Valid
X2.5	0.429	0.1678	Valid
Pengetahuan (X₃)			
X3.1	0.537	0.1678	Valid
X3.2	0.524	0.1678	Valid
X3.3	0.536	0.1678	Valid
X3.4	0.527	0.1678	Valid
X3.5	0.455	0.1678	Valid
Sanksi (X₄)			
X4.1	0.373	0.1678	Valid
X4.2	0.394	0.1678	Valid
X4.3	0.367	0.1678	Valid
X4.3	0.537	0.1678	Valid
X4.5	0.423	0.1678	Valid
Kesadaran (X₅)			
X5.1	0.552	0.1678	Valid
X5.2	0.663	0.1678	Valid
X5.3	0.728	0.1678	Valid
X5.4	0.597	0.1678	Valid
X5.5	0.365	0.1678	Valid
Kepatuhan (Y)			
Y1	0.381	0.1678	Valid
Y2	0.619	0.1678	Valid
Y3	0.555	0.1678	Valid
Y4	0.532	0.1678	Valid

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator dari semua variabel penelitian yang digunakan adalah valid atau mampu mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat, karena nilai r hitung berkisar 0,362 sampai 0,728 dan berada di atas nilai r tabel 0,1678 (*two tailed*). r tabel adalah nilai r *product moment* yang terdapat di tabel.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidak nya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *cronbach Alpha*. Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau ariabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0,6 (nunnaly, 1994 dalam Gozali, 2011 : 48).

Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS 16 yang mana dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (nilai standar). Hasil uji reliabel dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11
Uji Reliabilitas**

No	Variabel dan Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Modernisasi (X ₁)	0.740	Reliabel
2	Kualitas (X ₂)	0.762	Reliabel
3	Pengetahuan (X ₃)	0.740	Reliabel
4	Sanksi (X ₄)	0.780	Reliabel
5	Kesadaran (X ₅)	0.771	Reliabel
6	Kepatuhan (Y)	0.755	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2017

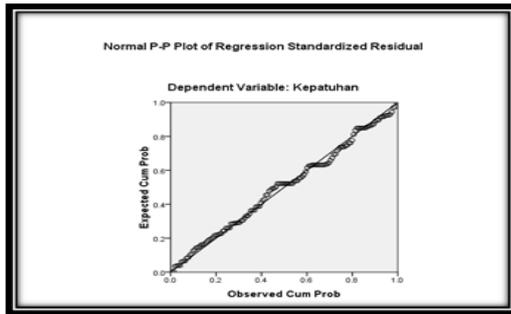
Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa keenam variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui bahwa Uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji variabel menjadi tidak Valid.Uji normalitas data dilakukan dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal

Gambar 4.12
Grafik Normal P-Plot



Dengan melihat grafik normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri, dan pada grafik normal probability plot titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal serta penyebarannya mendekati garis diagonal pada *Normal P – Plot Of Regression Standardized Residual*, dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal sedangkan pada grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal model regresi memenuhi Uji Asumsi Normalitas.

Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, karena jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Pada penelitian ini Uji Multikolonieritas dilakukan dengan cara:

Tabel 4.13
Coefficients ^a

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
LoX1	0,569	1,756	Bebas Multikolonieritas
LoX2	0,751	1,332	Bebas Multikolonieritas
LoX3	0,616	1,624	Bebas Multikolonieritas
LoX4	0,783	1,276	Bebas Multikolonieritas
LoX5	0,674	1,484	Bebas Multikolonieritas

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen (variabel bebas)

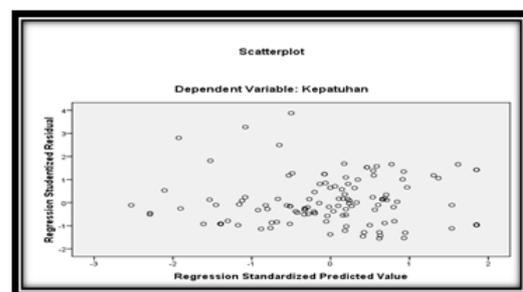
Nilai *Variance Iflation Factor* (VIF)

Hasil perhitungan nilai *variance iflation factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Gambar 4.14
Grafik Scatterplots



Dari grafik *Scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak

dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)

Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan menggunakan probabilitas signifikan, berdasarkan nilai alpha 5%. Apabila probabilitas signifikan kurang dari 0,05% maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.050	1.972		1.039	.301	-1.851	5.950				
Modernisasi	.141	.091	.146	1.546	.125	-.039	.322	.408	.134	.110	.569
Kualitas	.210	.080	.218	2.644	.009	.053	.368	.432	.225	.189	.751
Pengetahuan	.089	.077	.103	1.135	.259	-.065	.240	.403	.099	.081	.619
Sanksi	.217	.067	.261	3.235	.002	.084	.350	.436	.272	.231	.783
Kesadaran	.065	.077	.073	.841	.402	-.087	.217	.315	.073	.060	.674

a. Dependent Variable: kepatuhan WP
Sumber: Data Diolah, 2017

Uji F (Serentak)

Pengujian secara simultan (Uji F), dimaksudkan untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan, secara serentak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.16
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235.515	5	47.103	13.031	.000 ^b
	Residual	473.536	131	3.615		
	Total	709.051	136			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Sanksi, Kualitas, Pengetahuan, Modernisasi
b. Dependent Variable: kepatuhan WP
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.16, didapatkan nilai F hitung sebesar 13,031 > F tabel 2,28 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel pemenuhan kepatuhan wajib pajak. Atau dengan kata lain H₀ diterima, yaitu modernisasi administrasi perpajakan,

kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi (R²)

koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan regresi dalam menerangkan variabel terikat. Berdasarkan tabel model summary nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah nilai pada kolom *Adjusted R Square*. Hal tersebut dikarenakan nilai Adjusted R Square tidak akan bertambah besar sepanjang variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

Tabel 4.17

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1			df2
1	.578 ^a	.332	.307	1.90126	.332	13.031	5	131	.000	1.828

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Sanksi, Kualitas, Pengetahuan, Modernisasi
b. Dependent Variable: kepatuhan WP
Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 4.17 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,307 ini berarti variabel y (kepatuhan wajib paja)Wajib Pajak 30,7 % sebagai variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadran perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 30,7 %. Sedangkan sisanya sebesar 69,3 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis 1

Berdasarkan Uji Hipotesis diketahui bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

(Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.146 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,546 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,125 Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima.

Dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adhitya Febrian (2015). Karena menurut penelitian terdahulu hasilnya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian di KPP Pratama Demak modernisasi sistem administrasi perpajakan belum ditingkatkan secara maksimal, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun.

Hipotesis 2

Berdasarkan Uji Hipotesis diketahui bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,218 dan memberikan t hitung sebesar 2,644 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Hasil hipotesis tersebut sejalan dengan teori sinyal, teori ini mempunyai gambaran bahwa dalam kualitas pelayanan harus baik agar wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Demak dibandingkan dengan KPP lain.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan I Putu Indra (2016) yang mengungkapkan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi hasil penelitian di KPP Pratama Demak, tingkat kualitas pelayanan nya semakin baik, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.

Hipotesis 3

Berdasarkan Uji Hipotesis diketahui bahwa pengetahuan perpajakan (3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.103 dan memberikan nilai t hitung sebesar 1,135 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,259 Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan I Putu Indra (2016), karena dalam penelitian ini mengungkapkan bawa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian di KPP Pratama Demak tingkat pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak masih rendah sehingga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis 4

Berdasarkan Uji Hipotesis diketahui bahwa sanksi perpajakan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,261 dan memberikan nilai t hitung sebesar 3,235 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan I Putu Indra (2016) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian di KPP Pratama Demak sanksi perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak masih rendah, jadi wajib pajak belum sadar akan sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah.

Hipotesis 5

Berdasarkan Uji Hipotesis diketahui bahwa kesadaran perpajakan (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,073 dan memberikan nilai t hitung sebesar 0,841 dan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,402 Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan teori atribusi berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing – masing individu.

Selain itu juga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhitya Febrian (2015) yang mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian di KPP Pratama Demak kesadaran perpajakannya masih rendah, sehingga tingkat kepatuhannya menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
2. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidakberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidakberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek ke depan, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam kualitas pelayanan perpajakan di KPP Pratama Demak sebaiknya ditingkatkan lagi agar wajib pajak yang membayar merasa nyaman dengan pelayanannya.
2. Dalam pengetahuan perpajakan lebih ditingkatkan lagi agar para wajib pajak bisa mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan perpajakan.
3. KPP Pratama Demak dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi angka kepatuhan wajib pajak. Karena semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak maka akan semakin maju perkembangan baik ekonomi dan infrastruktur lain di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Febrian Arifin,2015, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama*,Jurnal Akuntansi.
- Afrizal Tahar dan Wilie Sandy, 2012, *Pengaruh Persepsi pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi.
- Annisa Dyah Perwira dan zaki Baridwan, 2016, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan*

- Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi.
- Anwar, Almaidah, 2013, *Buku Profil KPP Pratama Demak*.
- Candra, Wibisono, dan mujilan (2013), *Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi,1 (1), hal.40.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Hanafi, Mamduh, 2010, *Teri Signaling*, dalam Skripsi Aditya Nugroho.
- I Putu Indra, 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Jurnal Akuntansi
- Musyarofah, Purnomo (2008),*Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, 5 (1), hal.35.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya, 2016, *Pengaruh Kualitas pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi.
- Perwira, Annisa Dyah, 2016, *Pengaruh Pengetahuan pajak, Keadilan Pajak dan Niat untuk Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi.
- Rahayu dan Lingga (2009),*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Paja Badan Pada KPP Pratama Bandung)*,Jurnal Akuntansi,1(2),Hal.124-Hal.674.
- Robbins, 2002, *Teori Artibusi*, hal.47, dalam Skripsi Ma'rifatumbillah.
- Robbins,2002,*Teori Atribusi*,Rineka Cipta, Jakarta : Erlangga. Dalam Skripsi Aditya Nugroho.
- Sandy, Wilie dan Tahar, Afrizal, 2012, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi.
- Sekaran, 2003, *Populasi dan Sampel*, dalam Skripsi Diyan Sulistyani.
- Sony Devano dan Siti Kurnia rahayu,2010,*Perpajakan: Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Kencana.
- Sugiyono, 2003, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : CV, Alfabeta.
- Sumianto, 2015, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada UKM di Yogyakarta*.Jurnal Akuntansi.
- Triwigati, 2013, *Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi,1 (1), hal.40. dalam Adhitya Febrian 2015).
- Yogatama, Arya, 2014, *Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi.

